



Risalah Kebijakan (POLICY BRIEF)

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Provinsi Lampung

Strategi Pembangunan Pendidikan di Provinsi Lampung dalam rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

"Pendidikan adalah jiwa sebuah masyarakat karena pendidikan melewati satu generasi ke generasi lainnya "

~ Gilbert Keith Chesterton: 1874-1936 "

"Kita tidak selalu bisa membangun masa depan bagi generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan"
(Franklin D Roosevelt)

Abstrak

Pendidikan bagaikan sebuah fondasi dalam suatu bangunan, makin kokoh fondasinya makin kuat bangunan tersebut berdiri. Sebagai sebuah fondasi, pendidikan merupakan elemen dasar yang sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik karena merupakan investasi pembangunan jangka panjang. Dengan merencanakan kebijakan pendidikan yang baik berarti telah merencanakan masa depan manusia yang baik dan antisipatif terhadap segala bentuk perubahan.

Pembangunan manusia (*Human Development*) di seluruh dunia, termasuk Indonesia, diukur melalui 3 aspek utama, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Pengeluaran per Kapita.

Nilai dari ketercapaian pembangunan manusia ditampilkan dalam bentuk indeks (skor tertentu dengan makna tertentu) yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Aspek dan indikator dari pembangunan manusia ini ditentukan oleh PBB melalui UNDP, sedangkan di Indonesia potret dari IPM di dapat dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS.

Dimensi pendidikan ditopang oleh 2 pilar utama yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sebagai sebuah metode baru, baik HLS dan RLS, mencerminkan berapa banyak penduduk usia produktif yang bersekolah dan dapat memperlihatkan tingkat pendidikan tertinggi penduduk suatu daerah.

Risalah Kebijakan (*policy brief*)

Strategi Pembangunan Pendidikan di Provinsi Lampung dalam rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perbedaan antara HLS dan RLS dipengaruhi oleh usia penduduk yang menjadi sasarannya, jika HLS merefleksikan penduduk yang berusia 7 – 24 tahun (rentang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi) maka RLS dipengaruhi oleh penduduk dewasa berusia ≥ 25 tahun ke atas.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung (2016), capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah sebesar 66,95, masih di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 69,55.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Lampung pada tahun 2015 sebesar 12,25 tahun, ini berarti harapan seorang anak untuk bersekolah di Lampung baru mencapai tingkat SLTA. Angka HLS Lampung ini hanya sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 12,55 tahun. Di Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar memiliki HLS tertinggi dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai 15,03 tahun. Sedangkan Papua memiliki HLS terendah dengan angka 9,95 tahun atau baru mencapai tingkat 1 SLTA.

Sementara itu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Lampung pada tahun 2015 baru mencapai 7,56 tahun atau setingkat kelas 1 SMP. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Lampung usia 25 tahun ke atas masih cukup jauh dibandingkan target wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan sejak tahun 1994. Secara nasional RLS baru mencapai 7,73 tahun atau sedikit di atas RLS Lampung.

DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi yaitu mencapai 10,70 tahun, sedangkan Papua masih menjadi Provinsi dengan capaian terendah yaitu 5,99 tahun.

Dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan IPM bidang pendidikan Provinsi Lampung yang paling efektif adalah dengan memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah, **sehingga nilai HLS akan naik serta memperhatikan penduduk produktif usia ≥ 25 tahun yang tidak/putus sekolah agar bisa kembali sekolah dan memiliki ijazah sebagai suatu langkah menaikkan nilai RLS Provinsi Lampung.**

Deskripsi Masalah

Berdasarkan kondisinya, saat ini IPM Lampung termasuk dalam kategori sedang, namun jika dibandingkan dengan Provinsi lain khususnya Sumatera, nampak bahwa capaian IPM Lampung berada pada posisi terendah. Sedangkan untuk dimensi pendidikan Provinsi Lampung berada sedikit di atas Provinsi Bangka Belitung.

Adanya disparitas dalam pembangunan antar kabupaten/kota juga merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan. HLS penduduk Metro dan Bandar Lampung pada tahun 2015 sudah mencapai 14,26 dan 13,35 tahun sementara HLS penduduk di Mesuji baru mencapai 10,78 tahun.

RLS untuk Kota Bandar Lampung dan Metro sudah melebihi wajib belajar 9 tahun (10,87 dan 10,55 tahun), tetapi untuk Kabupaten Mesuji baru mencapai 6,12 tahun.

Jika dilihat dari tren peningkatan/kemajuan pencapaian periode 2010-2015, HLS secara rata-rata tumbuh sebesar 2,51 persen per tahun sedangkan RLS tumbuh 0,85 persen per tahun. Secara nasional HLS secara rata-rata tumbuh sebesar 2,23 persen per tahun, sedangkan RLS tumbuh sebesar 1,02 persen. Sehingga dapat dilihat rerata pertumbuhan IPM Provinsi Lampung pada dimensi pendidikan masih dibawah rerata nasional.

Merujuk beberapa hasil penelitian dan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi HLS dan RLS, yaitu:

1. Biaya Pendidikan

Meskipun saat ini Pemerintah telah mengalokasikan dana BOS (Belanja Operasional Sekolah), BAUSKM (Bantuan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin), maupun pemberian beasiswa, namun sebagian besar masyarakat masih merasakan beratnya kebutuhan untuk memenuhi biaya pendidikan, baik dalam bentuk iuran komite sekolah, pakaian seragam, buku pelajaran, dan lainnya.

2. Kemiskinan

Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung juga berdampak signifikan terhadap tingginya angka putus sekolah. Hal ini menyebabkan anak usia sekolah yang seharusnya duduk dibangku sekolah terpaksa bekerja membantu perekonomian keluarga.

3. Angka Ketergantungan (*dependency ratio*)

Besarnya jumlah anggota keluarga/angka ketergantungan juga mempengaruhi peluang seorang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya.

4. Tempat Tinggal (akses)

Tidak meratanya lokasi tempat tinggal penduduk khususnya di wilayah yang memiliki aksesibilitas terbatas menyebabkan biaya tinggi untuk transportasi anak untuk sampai ke sekolah.

Sebagai pembanding, berdasarkan hasil Susenas BPS tahun 2014 penyebab utama anak tidak bersekolah/putus sekolah adalah: 1) menikah/mengurus rumah tangga (6,42 %), 2) merasa pendidikan cukup (9,09 %), 3) bekerja (11,97 %) dan 4) tidak ada biaya (50,15 %).

1. Kondisi Siswa

Berdasarkan data Balitbangnovda tahun 2015 jumlah seluruh siswa di Provinsi Lampung sebanyak 1.647.549 siswa (Sumber: data olahan berdasarkan dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung). Dari jumlah tersebut **terdapat 151.173 anak tidak bersekolah**, yang terbagi dalam 3 kelompok usia, yaitu: Usia 7 – 12 tahun sebanyak 18.825 anak, 13 – 15 tahun sebanyak 34.131 anak dan 16 – 18 tahun sebanyak 98.217 anak (Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40 %, Data TNP2K: 2015).

Penyebab utama dari anak tidak bersekolah/putus sekolah menurut hasil Susenas BPS tahun 2014 adalah: 1) menikah/mengurus rumah tangga (6,42 %), 2) merasa pendidikan cukup (9,09 %), bekerja (11,97 %) dan **4) tidak ada biaya (50,15 %)**. Penyebab utama anak putus sekolah adalah alasan tidak ada biaya, namun di sisi lain persepsi anggaran pendidikan di Provinsi Lampung mengacu pada 20 % dari APBD mau pun APBN. Artinya kemungkinan bahwa proporsi di dalam anggaran 20 % pendidikan tersebut belum menjadikan siswa sebagai sasarannya tetapi ke hal teknis lainnya (gaji/tunjangan PTK, pembangunan USB dan RKB atau pun belanja modal/sarana dan prasarana).

Matriks 1.1 Kondisi Siswa

No.	Anak Putus Sekolah			
	Usia 7 – 12 tahun	Usia 13 – 15 tahun	Usia 16 – 18 tahun	Total
1.	18.825	34.131	98.217	151.173

Sumber: data diolah

2. Kondisi Guru

Jumlah **seluruh guru** semua jenjang di Provinsi Lampung **sebesar 141.779 guru** (Sumber: Data diolah Balitbangnovda 2016). Dari jumlah tersebut yang berstatus PNS sebesar 66,113 guru sedangkan rata-rata rasio guru-siswa Provinsi Lampung sebesar 11,62. Rasio terbesar ada di Kota Bandar Lampung sebesar 13,78 dan yang terkecil di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10,09.

Ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang ada cenderung meningkat tetapi tidak sebanding dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah.

Rasio guru-siswa yang cenderung menurun memang terjadi secara nasional dari tahun 2000 – 2010, yakni dari angka 22,2 menjadi 16,0 (Sumber: Balitbang Kemdikbud RI) dan hal ini terkait dengan distribusi guru yang lebih banyak di kota dari pada di kabupaten.

Masalah lainnya mengenai guru adalah kualitas guru. Berdasarkan data LPMP Provinsi Lampung, Kualitas guru di Provinsi Lampung dari skor 0 -100 (rata-rata nasional 56,69), nilainya masih di bawah angka tersebut yaitu sebesar 53,38 (aspek pedagogi dan profesionalisme).

Matriks 2.1 Kondisi Guru

No.	Seluruh Guru Semua Jenjang	Guru PNS	Rata-rata Rasio Guru- Siswa
1.	141.779	66.113	11,62

No.	Nilai UKG					
2.	Nasional	Provinsi Lampung				
		SD	SMP	SMA	SMK	Rata-rata Provinsi
	56,69	50,02	55,4	60,6	55,7	53,38

Sumber: data diolah

3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan **jumlah sekolah** semua jenjang dan status di Provinsi Lampung secara umum cukup yakni **sebanyak 8.566 sekolah** dengan ruang kelas sebanyak 62,783 (Sumber: Data diolah Balitbangnovda Provinsi Lampung: 2016). Rasio antara siswa-ruang kelas rata-rata Provinsi Lampung sebesar 26,24 yang berarti pada setiap satu kelas berisi 26,24 murid/siswa.

Dari semua kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung memiliki rasio tertinggi yakni sebesar 36,23 dan Kabupaten Pesisir Barat memiliki rasio terendah sebesar 20,48.

Meskipun dari segi kuantitas cukup, namun secara kualitas ruang kelas yang masuk kategori baik hanya sebesar 17.128 RK (27,28 %), sisanya sebanyak 45.655 RK (72,72 %) masuk dalam kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat dan Rusak Total.

Matriks 3.1 Kondisi Sekolah dan Ruang Kelas

No.	Jumlah Sekolah Semua Jenjang	Ruang Kelas (RK)				Rata-rata Rasio RK- Siswa
1.	8.566	62.783				26,24

No.	Kondisi Ruang Kelas					Jumlah Total
2.	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	62.783 RK
	17.128	32.670	4.307	4.914	3.764	

Sumber: data diolah

Kesimpulan

1. Penyebab nilai IPM bidang pendidikan Provinsi Lampung yang rendah sangat dipengaruhi oleh penduduk produktif usia ≥ 25 tahun yang tidak bersekolah/ memiliki ijazah. Selama ini tidak dibenahi maka nilai IPM Provinsi Lampung akan tetap rendah;
2. Penggunaan metode angka partisipasi memang bukan suatu tindakan yang salah, namun penggunaan indikator tersebut hanya akan merefleksikan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada usia 7 – 18 tahun di wilayah tertentu dan belum memperlihatkan kualitas pendidikan serta tidak mempengaruhi nilai IPM.
3. Penyebab siswa tidak bersekolah/putus sekolah terbesar adalah karena faktor tidak ada biaya (50,15%),

oleh karena itu proporsi anggaran pendidikan perlu diarahkan untuk membenahi hal tersebut terlebih dahulu dibandingkan menambah Unit Sekolah Baru/ Ruang Kelas Baru (USB/RKB);

4. Konsep pendidikan adalah mencakup 3 aspek Utama, yakni: Akses - Tata Kelola – Mutu. Ketiga aspek tersebut terkait dan secara keseluruhan saling mempengaruhi, maka perlunya sinkronisasi data dan sinergisitas para *stakeholders* yang menangani pendidikan, bukan hanya mengejar target jangka pendek berupa nilai IPM.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi tentang beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya percepatan pembangunan IPM bidang pendidikan antara lain:

1. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah **terutama dengan sasaran penduduk produktif usia ≥ 25 tahun**, maka menggalakkan kembali pendidikan penyetaraan seperti Paket A, B, dan C menjadi hal yang paling memungkinkan.
2. Program sekolah gratis khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya

harus memastikan bahwa tidak ada siswa yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggratiskan seluruh biaya sekolah dengan pemberian subsidi dalam bentuk BOSDA ataupun pemberian bantuan bersyarat kepada siswa dari keluarga miskin.

3. Membangun basis data terpadu yang dapat merangkum data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), siswa maupun sarana dan prasarana pendidikan Provinsi Lampung yang terintegrasi, diperbarui, **dan sinergis dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.** Sehingga dapat dipetakan permasalahan yang ada secara rinci, ketersediaan dan sebaran guru, perkembangan siswa apakah melanjutkan atau putus sekolah, kondisi dan sebaran ruang kelas apakah telah memenuhi kebutuhan, dsb.
4. Secara lokus, strategi yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Provinsi adalah memprioritaskan wilayah yang memiliki HLS dan RLS yang rendah sesuai dengan karakteristik permasalahan di wilayah tersebut.

Risalah Kebijakan (*policy brief*)

Strategi Pembangunan Pendidikan di Provinsi Lampung dalam rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

5. Dalam jangka panjang juga harus dibangun kelembagaan di tingkat masyarakat yang dapat menjadi *early warning system* bagi anak-anak yang memiliki potensi untuk putus sekolah dan penduduk usia ≥ 25 tahun berupa satuan tugas di masing-masing kabupaten/kota yang melibatkan aparat pemerintah sampai jenjang terbawah (perangkat desa) yang diharapkan bisa memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan IPM Provinsi Lampung secara signifikan.

Rujukan

- Data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Data Pokok Pendidikan Provinsi Lampung tahun 2015/2016.
- Data Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung 2014/2015.
- Policy Brief Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- FGD dengan BPS Provinsi Lampung, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung, Akademisi Universitas Lampung, Akademisi Universitas Bandar Lampung, Unsur Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

Kepala Balitbangnovda Provinsi Lampung,

dto

Ir. MULYADI IRSAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670517 199303 1 011